

# USULAN PROPOSAL PENELITIAN



**Judul  
Penelitian:**

**ANALISIS KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DAN KEBIJAKAN  
PENINGKATANNYA DI PROVINSI JAMBI**

Oleh:

Deby Aisyah Rj Nur, SE., MM

Dr. Faradilla Herlin, SE., M.Si

Dr. Sesarria Yuvanda, SP., ME

Dibiayai  
oleh:


Dipa Universitas Muhammadiyah Jambi Tahun Anggaran  
2022/2023

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
JAMBI TAHUN 2022**

## HALAMAN PENGESAHAN


1. Judul Penelitian : Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Dan Kebijakan Peningkatannya Di Provinsi Jambi
2. Tim Penelitian
  - a) Ketua Tim Peneliti
    - a. Nama : Deby Aisyah RJ Nur
    - b. NIDN : 1019128902
    - c. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
    - d. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
    - e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi
  - b) Anggota Peneliti
    - a. Nama : DR. Faradilla Herlin, SE., M.Si
    - b. NIDN : 1015038501
    - c. Jabatan Fungsional : Lektor
    - d. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
    - e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi
  - c) Anggota Peneliti
    - a. Nama : DR. Sesarria Yuvanda, SP., ME
    - b. NIDN : 1001077601
    - c. Jabatan Fungsional : Lektor
    - d. Program Studi : Ekonomi Pembangunan
    - e. Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Jambi
3. Lokasi Kegiatan : Provinsi Jambi
4. Lama Penelitian : 7 Bulan
5. Biaya Total Penelitian : 2.500.000,-
  - Dana Internal : 1.500.000,-
  - Dana Eksternal : 1.000.000,-

Mengetahui,  
Ka Prodi Ekonomi Pembangunan

  
(Ratih Rosita, SE, MSi)  
NIDN. 1011118603

Jambi, 31 Desember 2022

Peneliti,

  
(Deby Aisyah RJ Nur, SE. MM)  
NIDN. 1019128902

Menyetujui,  
Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Jambi



  
(Prima Audia Daniel, SE., ME.)

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Dalam era otonomi daerah, maka dalam kemandirian daerah dalam pembiayaan keuangan daerah sangat di perlukan. Daerah yang memiliki sumber pembiayaan sendiri, yang berasal dari PAD akan lebih otonom dan dapat mempercepat pembangunan daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus meningkatkan kemandirian keuangan daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Disamping ketergantungan dengan pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan yang berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana insentif daerah dan dana otsus dan dana daerah istimewa.

Untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah maka potensi PAD harus dioptimalkan, agar kontribusi PAD terhadap keuangan daerah meningkat. Potensi PAD dapat bersumber dari pajak dan retribusi daerah, laba BUMD, dan hasil pengelolaan asset daerah lainnya. Untuk itu potensi instrument PAD tersebut harus digali dan di targetkan menjadi sumber PAD yang mendukung pembiayaan pembangunan daerah.

Provinsi jambi merupakan daerah otonom yang punya kewajiban meningkatkan kemandirian keuangan sehingga dapat mempercepat pembangunan daerah, terutama pembangunan infrastruktur daerah. Selama 10 tahun terakhir yang di perhatikan data tahun 2000 – 2020 tingkat kemandirian keuangan provinsi jambi rata – rata kategori cukup, dengan nilai rasio sebesar 37,96%. Ini berarti provinsi jambi hanya mampu membiayai sebesar 37,96% dari total pembiayaan yang di butuhkan untuk pembangunan yang di butuhkan oleh provinsi jambi. Berarti pula sebesar 62,04% dari total pembiayaan pembangunan berasal dari APBN atau dana transfer dari pusat dalam bentuk dana perimbangan. Hal ini memperlihatkan bahwa provinsi jambi sangat bergantung pada dana dana perimbangan tersebut untuk membiayai pembangunan daerah.

Guna untuk menelaah dan mengkaji lebih dalam tentang kemandirian keuangan provinsi jambi, maka di perlukan kajian yang lebih rinci terhadap faktor faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan provinsi jambi. Disamping itu perlu juga dirumuskan kebijakan untuk meningkatkan kemandirian keuangan tersebut.

### **1.2. Perumusan Masalah**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah
2. Untuk mengetahui kebijakan apakah yang harus dilakukan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah.

### **1.3. Tujuan Penelitian**

2. Untuk menentukan faktor-faktor apakah yang menentukan kemandirian keuangan daerah
3. Untuk merumuskan kebijakan untuk peningkatan kemandirian keuangan daerah

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat akademis  
Sebagai referensi bagi peneliti maupun akademisi, dalam memperkaya wacana tentang keuangan daerah khususnya tentang kemandirian keuangan daerah beserta kebijakan peningkatannya.

## 2. Manfaat Praktisi

Sebagai masukan bagi pemerintah provinsi jambi, khususya badan pengelola keuangan dan asset daerah. Dalam merumuskan kebijakan peningkatan kemandirian keuangan daerah di provinsi jambi

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Konsep Keuangan Daerah**

Seiring dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, maka untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 32 Tentang Pemerintah Daerah mulai tahun 2004.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 2). Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan (UU No. 32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 4).

Hak, wewenang dan kewajiban daerah di atas ini terkait dengan pendapatan dan pengeluaran daerah yang di sebut dengan keuangan daerah. Menurut Kuswandi (2016), Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Kuswandi, Aos. (2016).

Sedangkan Menurut Mamesah dalam Halim (2007), yang dimaksud dengan Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku. Mamesah, D. J. 1995.

Untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, perlu diatur tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang adil, selaras, dan akuntabel. Oleh karena itu diaturlah hak dan kewajiban daerah terkait keuangan daerah dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2002 Pasal 21. Diantaranya pengelolaan kekayaan daerah, pemungutan pajak dan retribusi daerah, bagi hasil dan sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah.

### **2.1.2 Kemandirian Keuangan Daerah**

Kemandirian Keuangan Daerah adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah (Abdul Halim, 2007).

Untuk mengukur Kemandirian Keuangan Daerah, digunakanlah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) yang menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber eksternal. Semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan suatu daerah, maka semakin kecil tingkat ketergantungannya terhadap sumber eksternal. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam

membayar pajak dan retribusi daerah. Semakin tinggi tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, berarti semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, dan semakin tinggi juga tingkat kesejahteraan masyarakat.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah diukur dengan Rumus Berikut ini :

.(Halim,2014)

$$RKKD = \frac{PAD}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

RKKD = Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

PAD = Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Transfer = Pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan

### 2.1.3 Potensi Kemandirian Keuangan Daerah

Pendapatan daerah bersumber dari 2 jenis, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Sumber eksternal ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber yang berasal dari pihak luar dan tidak secara langsung ditangani sendiri oleh pemerintah daerah. seperti pemerintah pusat, tingkatan pemerintahan yang ada di atas pemerintahan daerah yang bersangkutan, negara asing, pihak swasta, dan pihak ketiga.



Sedangkan sumber internal adalah pendapatan yang digali dan ditangani sendiri oleh pemerintah daerah dari sumber-sumber pendapatan yang terdapat dalam wilayah yurisdiksinya. Sumber internal meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil-hasil Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Mohammad Riduansyah, 2003.

Kemandirian Keuangan Daerah sangat dipengaruhi oleh sumber keuangan internal, oleh karena itu untuk pemerintah daerah perlu memberi perhatian lebih untuk dapat menggali lebih dalam terhadap potensi pendapatan daerah dari sumber internal ini. Beberapa sumber internal yang memiliki potensi diantaranya sebagai berikut :

#### 1. Pajak daerah

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah yang telah diperbaharui oleh UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, pajak daerah yang bisa dipungut oleh pemerintah daerah adalah sbb :

- (1) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas :
  - a. PKB;
  - b. BBNKB;
  - c. PAB;
  - d. PBBKB;
  - e. PAP;
  - f. Pajak Rokok; dan
  - g. Opsen Pajak MBLB.

(2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

## 2. Retribusi daerah

Jenis Retribusi terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Pedzinan Tertentu.

## 3. Badan Usaha Milik Daerah

BUMD menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

### **2.1.4 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah**

Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah, seperti kondisi geografis daerah meliputi kekayaan alam daerah, iklim,

demografi, pengeluaran daerah itu sendiri, PDRB, investor, pertumbuhan ekonomi, dana perimbangan, dan pinjaman.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/Tahun/judul	Hasil Penelitian
1.	Stannia Cahaya Suci dan Alla Asmara / 2014 / Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan rasio Dana Perimbangan berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi
2.	Royda dan Dwi Riana / 2019/ Analisis Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut: Rasio kemandirian keuangan daerah rata-rata sangat rendah masih disekitar 0%-25%, sedangkan untuk rasio kemandirian keuangan daerah juga tergolong masih kurang yaitu rataa-rata berada di antara 0%-10%. Kemandirian daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomisedangkan kemampuan keuangan daerah berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi sumater selatan
3.	Fahriansyah Syam / 2022 / Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten KaimanaKabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan	Berdasarkan hasil analisis, pemerintah daerah perlu mengeluarkan upaya strategis dengan melakukan pemberdayaan potensi daerah yang dapat dijadikan sumber penerimaan daerah sehingga dapat mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang pada

		hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
--	--	---

### 2.3. Karangka Pikir

Kemandirian Keuangan Daerah merupakan rasio yang memperlihatkan perbandingan antara total PAD yang diterima pemerintah daerah dengan total pendapatan daerah. Rasio tersebut memperlihatkan kemampuan daerah secara mandiri untuk membiayai total belanja daerah untuk membangun daerahnya.

Untuk meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah maka banyak faktor yang dapat mempengaruhinya. Faktor tersebut berasal dari kondisi makro ekonomi berupa variabel PDRB dan Investasi. Sedangkan dari sisi keuangan juga turut mempengaruhi Kemandirian Keuangan Daerah seperti pajak daerah dan dana perimbangan.

PDRB merupakan nilai produksi yang dimiliki pemerintah daerah dan berasal dari 17 sektor. PDRB tersebut dapat mendorong peningkatan keuangan daerah melalui nilai produksi yang terjadi yang akan dikenakan biaya berupa pajak dan retribusi daerah sebagai sumber PAD. Ini berarti peningkatan PDRB berpengaruh kepada peningkatan keuangan daerah.

Pajak daerah merupakan penyumbang terbesar terhadap PAD. Ini berarti pajak merupakan andalan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD, sedangkan besaran PAD menentukan tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

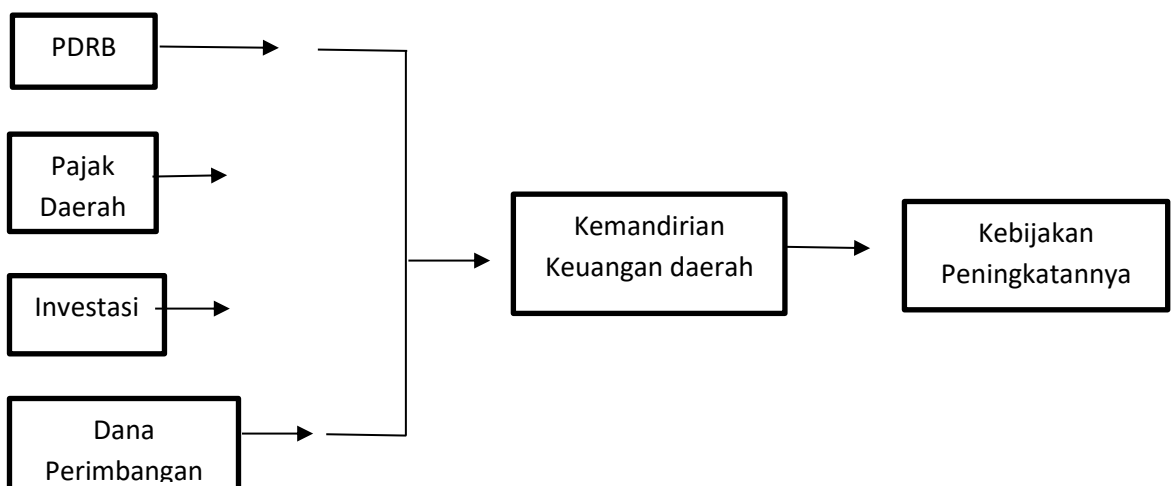
Investasi bagi daerah merupakan sumber tidak langsung terhadap penerimaan daerah, dalam bentuk penerimaan pajak dan restribusi daerah serta bagi hasil lainnya, penerimaan daerah tersebut akan berdampak pula terhadap kemandirian keuangan sebagai sumber pendapatan keuangan lainnya.

Dana perimbangan penyumbang terbesar dalam pembiayaan daerah. Dana perimbangan berasal dari transfer pemerintah pusat ke daerah, semakin besar dana perimbangan, maka semakin kecil tingkat kemandirian.

Guna meningkatkan kemandirian daerah maka diperlukan kebijakan yang tepat yang menghasilkan program yang unggul bagi peningkatan PAD agar kemandirian keuangan meningkat. Kebijakan dan program tersebut harus didalami dan dianalisis lebih tajam agar menghasilkan kebijakan dan program yang dapat menstimulan meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah.

Dari uraian diatas maka kerangka pemikirannya adalah seperti yang gambar di bawah ini :

Gambar 3.1. Skema Kerangka Pikir



## **BAB III**

### **METODE DAN TEKNIK PENELITIAN**

#### **3.1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari publikasi instansi terkait. Yang di maksud dengan analisis data sekunder adalah analisis terhadap data yang telah di laporkan oleh suatu badan, organisasi dimana badan atau organisasi itu sendiri tidak langsung mengumpulkan, melainkan diperoleh dari pihak lain yang telah mengumpulkan terlebih dahulu dan menerbitkannya berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dalam bentuk runtun waktu (*time series*) selama tahun 2000 sampai tahun 2021, yang meliputi data :

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jambi 2000-2021.
2. Realisasi Penerimaan Dana Perimbangan Provinsi Jambi 2000-2021.
3. Realisasi Total Penerimaan Daerah Provinsi Jambi 2000-2021
4. APBD perubahan Tahun Anggaran 2000-2021
5. Investasi Daerah Provinsi Jambi 2000-2021
6. PDRB Harga Konstan 2000-2021
7. Pajak Daerah Provinsi Jambi 2000 - 2021
8. Dana Perimbangan Provinsi Jambi 2000-2021

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari instansi pemerintah yang telah terdokumentasi, yaitu:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi
2. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jambi
3. Bank Indonesia Perwakilan Jambi
4. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi

### 3.3. Model Analisis Data

#### 3.3.1 Model Analisis Pertama

Untuk menjawab tujuan penelitian pertama, yaitu determinasi kemampuan keuangan daerah Provinsi Jambi periode 2000-2021 dengan menggunakan semi logaritma dan alat analisis regresi linear berganda. Dimana dalam penelitian ini yaitu PDRB, Pajak Daerah, INV, dan DP sebagai variabel independent (variabel bebas), akan dianalisis pengaruhnya terhadap kemampuan keuangan daerah (KKD) sebagai variabel dependent (variabel terikat).

Model persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini dengan formula sebagai berikut :

$$KKD = \beta_0 + \beta_1 PE + \beta_2 \text{LogPAD} + \beta_3 \text{LogINV} + \beta_4 \text{LogDP} + e$$

#### Keterangan:

KKD	= Kemandirian Keuangan Daerah
PE	= Pertumbuhan Ekonomi (persen)
PJD	= Pajak Daerah
INV	= Investasi (PMDN + PMA) (juta rupiah)
DP	= Dana Perimbangan
Log	= Logaritma
$\beta_0$	= Konstanta
$\beta_{1-5}$	= koefisien regresi untuk masing-masing variabel bebas
e	= standar error
t	= waktu

## **B.1 Uji Asumsi Klasik**

Pengujian regresi linier berganda dengan menggunakan OLS (*Ordinary Least Square*) dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut tidak mengandung multikolinearitas, dan heterokedastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari:

### **a. Uji Normalitas**

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independent, variabel dependent atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Salah satu metode yang banyak digunakan untuk menguji normalitas adalah dengan Uji *Jarque-Bera*. Pengujian normalitas dilakukan dengan *Jarque-Bera test*. Uji *Jarque-Bera* mempunyai nilai *chi square* dengan derajat bebas dua. Jika hasil uji *Jarque-Bera* lebih besar dari nilai *chi square* pada  $\alpha = 5\%$ , maka hipotesis nol diterima yang berarti data berdistribusi normal. Jika hasil uji *Jarque-Bera* lebih kecil dari nilai *chi square* pada  $\alpha = 5\%$ , maka hipotesis nol ditolak yang artinya tidak terdistribusi normal.

### **b. Uji Linearitas**

Pengujian linieritas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa rata-rata yang diperoleh dari kelompok data sampel terletak dalam garis-garis lurus. Kriteria pengujiannya adalah kelinieran dipenuhi oleh data jika  $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ , atau angka signifikansi yang diperoleh kurang dari 0,05. Angka signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan kelinieran tidak dipenuhi.



Dasar pengambilan keputusan dengan melihat angka probabilitas, yaitu :

- a) Probabilitas Sig.  $> 0,05$ , berarti tidak terdapat perbedaan kelinieran antara variabel independen (variabel bebas) dengan variabel dependen (variabel terikat).
- b) Probabilitas Sig.  $< 0,05$ , berarti terdapat perbedaan kelinieran antara variabel independen (variabel bebas) dengan variabel dependen (variabel terikat).

**c. Uji Multikolinearitas**

Multikolinearitas adalah suatu gejala dimana terdapat korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka variabel ini tidak ortogonal yang artinya variabel independen memiliki nilai korelasi antar sesama variabel sama dengan nol. Untuk mendeteksi apakah terjadi multikolinearitas atau tidak di dalam model, dapat dilihat apakah *R-Squared* yang dihasilkan oleh estimasi tinggi, akan tetapi secara individu variabel independen banyak yang tidak signifikan.

Dalam penelitian ini, cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas didalam model adalah dengan melihat matriks koefisien korelasi. Jika terdapat variabel yang memiliki nilai korelasi mendekati 1, maka model teridentifikasi multikolinearitas sempurna, sedangkan jika tidak terjadi multikolinearitas sempurna, maka model bisa digunakan untuk estimasi.

Cara untuk mendeteksi terhadap multikolinearitas pada penelitian ini dilakukan seperti  $R^2$  yang tinggi dan Uji F yang signifikan, tetapi banyak koefisien regresi dalam Uji t yang tidak signifikan.

#### d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi (serial korelasi) adalah korelasi yang terjadi di antara anggota observasi yang berdekatan. Bila asumsi ini tidak dipenuhi maka estimator OLS (*Ordinary Least Square*) tidak lagi efisien. Karena selang keyakinan akan semakin lebar, berarti uji t dan uji F menjadi tidak valid dan kurang kuat. Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu (seperti dalam data *time series*) atau ruang (seperti dalam data *cross section*). Autokorelasi pada umumnya lebih sering terjadi pada data *time series* walaupun dapat juga terjadi pada data *cross section*. Dalam data *time series*, observasi diurutkan menurut urutan waktu secara kronologis. Maka dari itu besar kemungkinan akan terjadi interkorelasi antara observasi yang berurutan, khususnya kalau interval antar dua observasi sangat pendek.

Adapun cara mendeteksi terjadinya autokorelasi dapat dilihat dengan menggunakan uji statistik Durbin Watson. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi bisa menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test).

**Tabel 3.1: Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi**

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No decision	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	No decision	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi, positif / negatif	Tidak ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber: Imam Ghozali, 2006

#### e. Uji Heteroskedastisitas

Suatu asumsi pokok dari model regresi linier klasik adalah bahwa gangguan (*disturbance*) yang muncul dalam regresi adalah homoskedastisitas, yaitu semua gangguan tadi mempunyai varian yang sama.

Salah satu cara mengatasi masalah heteroskedastisitas adalah dengan melakukan transformasional log. Karena transformasional log linier akan mengurangi situasi heteroskedastisitas, dalam hal ini transformasional log akan memperkecil skala ukuran variabel. Untuk menguji tidak terjadinya heterosdastisitas dilakukan dengan melakukan uji park. *Rule of thumb* yang digunakan adalah bila nilai  $t\text{-hitung} > t\text{-probalitas}$  ( $p\text{ value}$ ), berarti terjadi heterosdastisitas namun sebaliknya apabila nilai  $t\text{-hitung} < t\text{-probalitas}$  ( $p\text{ value}$ ) maka akan terjadi heteroskedastisitas.

## **B.2 Uji Hipotesis**

Uji hipotesis secara statistik, setidaknya ini dapat diukur dari nilai statistik  $t$ , nilai statistik  $F$  dan nilai koefisien determinasi. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana  $H_0$  ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana  $H_0$  diterima (Ghozali, 2006).

### **1. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik $t$ )**

Uji  $t$  dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel bebas lainnya adalah konstan. Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut :  $H_0$  ditolak  $H_1$  diterima apabila  $t\text{ hitung} > t\text{ tabel}$ , yang berarti variabel independennya berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

## **2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)**

Uji Statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Cara untuk mengetahuinya yaitu dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel. Apabila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel, maka hipotesis alternatif diterima artinya semua variabel independen secara bersama-sama dan signifikan mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel, maka variabel-variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Hipotesis yang digunakan :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = \beta_5 = 0$$

$H_1$  : minimal ada satu koefisien regresi tidak sama dengan nol

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut :

1.  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak apabila  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , yang artinya variabel penjelas secara serempak atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.
2.  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima apabila  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , yang artinya variabel penjelas secara serentak dan bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

## **3. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi  $R^2$  pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independent. Nilai koefisien

determinasi diantara 0 dan 1 ( $0 < R^2 < 1$ ), nilai ( $R^2$ ) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel independent sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memperoleh prediksi variasi model dependent. Semakin tinggi nilai koefisien determinasi maka akan semakin baik pula kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

### 3.3.2 Model Analisis Kedua

Untuk menjawab tujuan penelitian yang kedua, yaitu merumuskan kebijakan pendekatan kemandirian keuangan daerah, maka digunakan model analisis Indeks Kebijakan. Model ini melakukan pendalaman terhadap hasil signifikansi regresi berganda yang akan di tuang kan kedalam kebijakan prioritas dan lebih lanjut akan di jabarkan kedalam program utama. Oleh karena itu indeks ini mendalami Kembali hasil signifikansi regresi yang pada akhirnya berujung kepada perumusan kebijakan dan program untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Guna memudahkan melakukan pendalaman yang di ikuti oleh perumusan kebijakan dan program yang berbasis kepada hasil signifikansi regresi berganda, maka digunakan tabel bantu berikut ini :

**Tabel Bantu  
Indeks Kebijakan**

No	Hasil Signifikansi Regresi Berganda	Skala Prioritas	Kebijakan Prioritas	Program Utama
1.	Probabilitas Sangat sangat kecil	P.I	KP.I	PU.I
2	Probabilitas Sangat Kecil	P.II	KP.II	PU.II

3.	Probabilitas Kecil	P.III	KP.III	PU.III
----	--------------------	-------	--------	--------

### 3.4 Operasional Variabel Penelitian

Adapun variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) adalah besar kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber keuangan yang dihitung dari rata-rata penjumlahan rasio kemandirian (RK), rasio efektifitas (RE), rasio belanja langsung (RBL), rasio belanja tidak langsung (RBTL) dan rasio pengelolaan belanja (RPB) yang diukur dalam persen.
2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah serta diperoleh melalui rasio besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah. Sehingga satuan rasio kemandirian diukur dalam persen.
3. PDRB adalah seluruh total sektor ekonomi di wilayah Provinsi Jambi dalam satu tahun yang dihitung dalam rupiah
4. Pajak Daerah adalah penerimaan daerah yang berasal dari Instrumen Pajak yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi berupa pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, biaya balik nama kendaraan bermotor, pajak tembakau, pajak air permukaan.
5. Investasi (INV) adalah kegiatan investasi menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman

modal dalam negeri maupun luar negeri dalam satu tahun anggaran yang dihitung dalam rupiah.

6. Dana Perimbangan (DP) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil yang dikumpulkan dalam satu tahun dan dihitung dalam juta rupiah.

## BAB V

### JADWAL PENELITIAN DAN ANGGARAN BIAYA

Penelitian tentang analisis kemandirian keuangan daerah dan kebijakan peningkatannya di provinsi jambi direncanakan memerlukan waktu 7 bulan. Deskripsi alokasi waktu untuk penelitian tersebut dimuat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.1 Alokasi Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	1	2	3	4	5	6	7
1	Penyusunan proposal							
2	Pengumpulan data sekunder							
3	Pengolahan dan analisis data							
4	Penyusunan laporan							
5	Seminar dan publikasi hasil penelitian							

Dalam penelitian ini rencana anggaran biaya yang dibutuhkan adalah 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Rencana penggunaan anggaran biaya tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5. Rincian Anggaran Biaya Penelitian

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Gaji dan Upah	1.000.000
2	Bahan/ Perangkat Penunjang/ Peralatan/laporan/publikasi	500.000,-
3	Perjalanan	500.000,-
4	sewa peralatan/mesin/peralatan penunjang penelitian	500.000,-
	JUMLAH	2.500.000,-



## DAFTAR PUSTAKA

- Kuswandi, Aos. 2016. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Bekasi: Badan Penerbit Universitas Islam '45' (UNISMA)
- Mamesah, D. J. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Riduansyah, Mohammad. 2003, *Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah Terhadap pendapatan asli daerah (PAD) dan anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) guna mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kota Bogor)*, Makara, Sosial Humaniora, Vol. 7, No. 2, Desember 2003, Pusat Pengembangan dan Penelitian, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok 16425, Indonesia.
- Royda, R., & Riana, D. 2019. *Analisis Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan*. Akuntansi Dan Manajemen, 14(2), 50.
- Suci, Cahaya Stannia dan Asmara, Alla. 2014. *Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten*. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan. Vol 3 No 1. Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor.
- Syam, F., & Zulfikar, A. (2022). *Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana*. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 2(2), 98-114. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666>